



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**SENIN, 2 JULI 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

# Pemerintahan Tanpa Korupsi, BU Dapat WTP

**ARGA MAKMUR** – Bengkulu Utara (BU) kembali membuktikan jika program pemerintahan bersih bebas korupsi benar-benar terwujud. Kamis (28/6) lalu, Bupati BU Ir. Mian didampingi Ketua DPRD Aliantor Harahap, SE menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bengkulu.



**RAIH WTP: Bupati Bengkulu Utara Ir. Mian menerima LHP LKPD dari BPK Perwakilan Bengkulu.**

Sambungan dari halaman 1

Audit tersebut adalah hasil audit atas belanja APBD 2017 dan BU mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan jika belanja APBD yang dilakukan Pekab BU sudah sesuai dengan aturan pengelolaan dan belanja keuangan.

Sejak awal tahun Bupati BU Ir. Mian memang sudah menekankan pada seluruh OPD terutama bendahara OPD untuk benar-benar awas dalam melakukan belanja. Ia meminta OPD benar-benar memahami aturan dalam pelaksanaan belanja keuangan.

"Jangan sampai ada belanja yang tidak sesuai dengan aturan apalagi bertentangan dengan aturan," tegasnya.

Ia juga meminta tidak ada pejabat yang coba-coba mengambil keuntungan dari belanja daerah. Selain itu, semua pola pertanggungjawaban harus disesuaikan dengan besaran belanja dan aturan pola

pertanggungjawaban dana.

"Kita sudah memberikan imbauan, kita undang BPK dan BPKP untuk melakukan pemaparan untuk memberikan ilmu pada OPD-OPD. Alhamdulillah hasilnya memuaskan," terang Mian.

Hasil WTP ini diyakininya adalah kerjasama semua pihak terutama jajaran dibawahnya. Ia meminta opini WTP ini dipertahankan dan terus memperbaiki hal-hal terutama pengelolaan keuangan hingga hasilnya lebih baik lagi.

"Kita sudah membuktikan jika kita bisa. Sekarang waktunya mempertahankan opini ini. Caranya jelas, sesuaikan pekerjaan dengan aturan yang sudah ada," tegas Mian.

Sekadar mengetahui, tahun lalu Pemkab BU sempat mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Saat itu ada beberapa catatan terutama aset. Namun 2017 semua sudah diperbaiki sesuai dengan anjuran BPK dan akhirnya Pemkab BU mendapatkan Opini WTP. (qia/adv)